



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 210 /A-02/ VI /TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 061/A-02/I/TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-02/I/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 128/A-02/IV/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-02/I/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, perlu disesuaikan dengan adanya penambahan judul Rancangan Peraturan Bupati dalam program pembentukan peraturan Bupati Luwu Timur, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-02/I/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
7. Keputusan Bupati Nomor 061/A-02/I/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 128/A-02/IV/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-02/I/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 061/A-02/I/TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

Diktum I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-02/I/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 128/A-02/IV/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 061/A-02/I/Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 ditambahkan 7 (tujuh) angka yakni angka 80 sampai dengan angka 91, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 210 /A-02/ VI /TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 061/A-  
 02/I/TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM  
 PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI LUWU  
 TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023	Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan	√		Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	BKAD	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD
2	Penetapan dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023	Penetapan Rincian Dana Desa dan Penggunaan Dana Desa	√		Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN	BKAD	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
3	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa	Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	√		Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD, Bapelitbangda, Bapenda, Dinas PUPR, Disdagkop, Bagian Kesra	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD
4	Perubahan Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan kegiatan di Desa	Siltap dan tunjangan		√	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD
5	Perubahan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Unsur Masyarakat Desa Lainnya	Penyesuaian Biaya Transportasi dan lainnya		√	Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/ Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
6	Pemekaran Dusun	Mekanisme pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun	√			Bagian Pemerintahan, Dinas dukcapil	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD
7	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur	Beberapa inovasi	√		Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring	Dinkes, Disdik, RSUD I La Galigo, RS Inco, Pengadilan Agama, Kemenag, PKK	Tahun 2023	Pemrakarsa: Disdukcapil
8	Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Perangkat Daerah	Perubahan besaran sewa transportasi		√	-	Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
9	Analisis Standar Belanja	Besaran Anggaran untuk Kegiatan Fisik	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas PUPR, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
10	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022	Penjabaran APBD	√		-	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
11	Verifikasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Verifikasi Pertanggungjawaban	√		-	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
12	Penyertaan Modal	Penyertaan Uang	√		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
13	Standar Harga Satuan	Standar harga	√		Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
14	Penyelenggaraan Layanan Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo	Layanan Parkir		√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Bapenda	Tahun 2023	Pemrakarsa: RSUD I La Galigo
15	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Daerah	Perubahan penetapan hasil perhitungan nilai sewa reklame sesuai indeks harga dan perkembangan perekonomian		√	Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame	DPMPTSP dan Satpol PP	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bapenda
16	Pemberian Pengurangan/ Pembebasan BPHTB bagi Penerima Sertipikat Program PTSL	Fasilitas pemerintah berupa Pemberian Pengurangan/ Pembebasan BPHTB bagi Penerima Sertipikat Program PTSL	√		Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis	Kementerian ATR/BPN dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bapenda
17	Rencana Kontijensi Gempa Bumi Tahun 2022-2024	Rencana Kontijensi Gempa Bumi	√		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Semua Perangkat Daerah	Tahun 2023	Pemrakarsa: BPBD
18	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara		√	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Semua Penyelenggara Negara	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Hukum
19	Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata	Pendaftaran Usaha Pariwisata	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 2021-2027	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Disparmudora

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
20	Tata Cara Pembentukan Badan Promosi Pariwisata	Badan Promosi Pariwisata	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 2021-2027	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Disparmudora
21	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan	Penghargaan kepemudaan, pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan, dan organisasi kepemudaan	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Disparmudora
22	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	√		Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Diskominfo-SP
23	Pedoman Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur	Acuan dalam Penanganan Perkara Hukum baik secara litigasi dan non litigasi	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	BKPSDM, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Hukum
24	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, dan standar pelayanan bantuan hukum	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Dinas Sosial dan P3A, dan BKAD	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Hukum

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
25	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara		√	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	BKAD	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Organisasi
26	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Badan Permusyawaratan Desa	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD
27	Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	√		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Semua Perangkat Daerah	Tahun 2023	Pemrakarsa: Inspektorat
28	Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026	Standar Pelayanan Minimal	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Semua Perangkat Daerah	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
29	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Alam Buana Kecamatan Tomoni Timur	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
30	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Agromulyo Kecamatan Kalaena	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
31	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Arolipu Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
32	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bahari Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
33	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Balrejo Kecamatan Angkona	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
34	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
35	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
36	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
37	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Beringin Jaya Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
38	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cendana Hitam Timur Kecamatan Tomoni Timur	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
39	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kalaena Kiri Kecamatan Kalaena	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
40	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kalaena Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
41	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
42	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karambua Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
43	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lampenai Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
44	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Madani Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
45	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Maliwowo Kecamatan Angkona	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
46	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

No.	JUDUL RANPERIBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
47	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
48	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mekar Sari Kecamatan Kalaena	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
49	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mulyasari Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
50	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Purwosari Kecamatan Tomoni Timur	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
51	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
52	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rinjani Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
53	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Solo Kecamatan Angkona	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
54	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Agung Kecamatan Kalaena	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
55	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
56	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tabaroge Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
57	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tadulako Kecamatan Tomoni	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
58	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
59	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tarengge Kecamatan Wotu	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
60	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wanasari Kecamatan Angkona	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan
61	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Watangpanua Kecamatan Angkona	Penegasan Batas Desa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Pemerintahan

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
62	Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Barang dan/atau Jasa	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	BKAD, BLUD UPTD Puskesmas, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinkes
63	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	BKAD, BLUD UPTD Puskesmas, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinkes
64	Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Tarif Layanan Kesehatan	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	BKAD, BLUD UPTD Puskesmas, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinkes
65	Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Remunerasi	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	BKAD, BLUD UPTD Puskesmas, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinkes
66	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Tata Cara Kerja Sama	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	BLUD UPTD Puskesmas, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinkes
67	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Pedoman Pelaksanaan Anggaran	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	BLUD UPTD Puskesmas, Inspektorat	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinkes

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
68	Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Organisasi
69	Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	√		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKPSDM
70	Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	√		Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Disdikbud
71	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah	Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah		√	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Kesejahteraan Rakyat
72	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	√		Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Tahun 2023	Pemrakarsa: Disdikbud

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
73	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023		√	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
74	Kode Klasifikasi Arsip Daerah	Kode Klasifikasi Arsip	√		Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
75	Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Luwu Timur	Arsitektur Sistem Pemerintah	√		Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
76	Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Luwu Timur	Penyelenggaraan Sistem Pemerintah	√		Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
77	Pedoman Audit Ketaatan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Audit Ketaatan pada Inspektorat	√		Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Inspektorat
78	Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pembentukan Produk Hukum Daerah		√	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Hukum

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
79	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	√		Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
80	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami	Penyertaan Modal	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami	Perumdam Waemami	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
81	Perubahan Atas Perbup Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kebijakan Akuntansi Properti Investasi		√	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan PSAP 17 terkait Properti Investasi	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: BKAD
82	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan Anggota Lembaga Masyarakat Desa serta Unsur Masyarakat Desa Lainnya	Biaya Perjalanan Dinas	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Pemerintah Desa	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMD
83	Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Pendelegasian Kewenangan	√		Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMPSTP

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
84	Standar Operasional Prosedur Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur	Prosedur Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	-	Tahun 2023	Pemrakarsa: DPMPPTSP
85	Standar Biaya Transportasi Lokal Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2023	Standar Biaya Transportasi Lokal	√		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023	BKAD, Puskesmas	Tahun 2023	Pemrakarsa: Dinkes
86	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	√		Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	Disdikbud	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Kesejahteraan Rakyat
87	Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami Kabupaten Luwu Timur	Pengadaan Barang/Jasa	√		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Perumdam Waemami, BKAD, Bagian PBJ	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Ekbang
88	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Organisasi

No.	JUDUL RANPERBUP	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4		5	6	7	8
					sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah			
89	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Luwu Timur	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	√		Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Dinas Kominfo-SP	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Hukum
90	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	√		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Semua SKPD	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bapelitbangda
91	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja	√		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Tahun 2023	Pemrakarsa: Bagian Organisasi

